



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

PEMBENTUKAN DESA RAMAH ANAK
TERBEBAS DARI PORNOGRAFI

KERJASAMA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DENGAN ECPAT INDONESIA



2023

LIST OF CONTENT

DAFTAR ISI



-  **Gambaran Umum.**
-  **Pelaksanaan Kegiatan.**
-  **Hambatan, Tantangan dan Peluang.**
-  **Rekomendasi**
-  **Lampiran**

GAMBARAN UMUM

Program Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi dan Desa Wisata Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi yang dikembangkan merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerjasama dengan ECPAT Indonesia.

Program ini bertujuan untuk membangun sistem pencegahan pornografi anak dan eksploitasi seksual anak berbasis komunitas Desa. Dalam implementasinya program ini menggunakan strategi pendekatan penguatan kapasitas pengetahuan hukum dan keahlian dalam melakukan legal drafting kebijakan desa yang berperspektif hak anak serta penyadaran pemahaman terhadap kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual kepada Pemerintah Desa, Masyarakat, Kelompok Perempuan, Stakeholder Desa, Orang Muda dan Anak-anak.

Selama 5 tahun dari tahun 2018- 2022, telah berhasil membentuk sebanyak 26 Desa, diantaranya 1 Desa di kabupaten Berau, 8 Desa/ Kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan, 1 Kelurahan di Kota Kupang, 3 Desa di Kabupaten Agam, 3 Desa di Kabupaten Bangka Belitung dan 3 Desa di Kabupaten Kota Waringin Barat dan 7 Desa di Kabupaten Bandung.

Di tahun 2023, program Pembentukan Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi terdiri dari 2 kegiatan, pertama kegiatan monitoring dan evaluasi pembentukan desa ramah anak terbebas dari pornografi yang dilaksanakan di 7 Desa di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dan kedua adalah pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi untuk 3 Desa di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Monitoring dan Evaluasi

Latar Belakang

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, Monitoring dan Evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Dimana jika mengacu pada pengertiannya monitoring dimaknai sebagai sebuah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. Sedangkan evaluasi artinya sebuah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara sistematis menginvestigasi efektivitas program. Menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi).

Dalam pelaksanaan Monev di tahun 2023 menyasar 7 Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi yang berada di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Latar belakang alasan pemilihan lokasi Monev adalah karena 7 Desa di kabupaten Bandung merupakan Desa yang baru satu tahun mendapatkan intervensi. Sehingga diharapkan melalui Monev dapat ditemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Selain itu juga diharapkan dapat menjaga agar implementasi program di tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Melalui Monev ini hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar tindakan untuk melakukan modifikasi terhadap program apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Tidak hanya itu Monev yang juga diperuntukkan untuk mengukur dampak suatu kebijakan diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk memproyeksikan dampak program, baik dampak positif maupun negatif. Sehingga apabila, terdapat kendala, hambatan atau pun tantangan sesegera mungkin dievaluasi agar tujuan, sasaran dan pencapaian target dapat segera dilakukan berdasarkan perencanaan awal.

Hasil dari monev ini merupakan masukan (input) bagi perencanaan dan pelaksanaan program yang akan datang agar program kedepan yang dihasilkan dapat tercapai lebih baik.

Dalam laporan ini, ECPAT Indonesia melaporkan beberapa kegiatan Monitoring dan Evaluasi, mulai dari kegiatan persiapan, hingga proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. Laporan ini kiranya dapat menggambarkan beberapa capaian, temuan lapangan dan rekomendasi pelaksanaan program kegiatan Monitoring dan Evaluasi.



PELAKSANAAN KEGIATAN

Monitoring dan Evaluasi

Gambaran Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 29-30 Agustus 2023. Dimana pada tanggal 29 Agustus 2023 dilakukan wawancara pada beberapa Dinas terkait, yaitu

1. Dinas PPPA

Wawancara dengan Dinas PPPA di Kabupaten Bandung diwakili oleh Ibu Fitri Kepala Bidang pada Dinas PPPA, Ibu Fitri menuturkan bahwa Dinas PPPA telah memiliki program-program sampai ke Desa, bahkan telah memiliki UPTD PPPA di tingkat kabupaten dan adanya satgas pelaporan kasus di tingkat kecamatan, namun untuk Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi memang belum mendapatkan kelanjutan intervensi secara khusus dari Pemerintah Kabupaten, hal ini karena adanya keterbatasan anggaran. Sementara itu terkait dengan mekanisme koordinasi antar Dinas, selama ini memanfaatkan forum komunikasi dan koordinasi UPT yang dibentuk oleh kabupaten.



Namun terkait dengan mengkoordinasikan secara khusus dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kominfo belum dilakukan. Dinas Kominfo beberapa kali melakukan kerjasama program dengan mengundang Dinas PPPA sebagai narasumber pada program siaran radio dari dinas Kominfo terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Bandung.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

Wawancara pada Dinas PMD diwakili oleh Ibu Ida A.J, dalam wawancara ibu Ida menuturkan bahwa Dinas PMD belum secara khusus melakukan pendampingan pada 7 Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi, namun secara umum Dinas PMD melakukan pendampingan terkait dengan penggunaan dana Desa termasuk pendampingan Musrembang dan penyusunan peraturan Desa hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri dan Bupati terkait dengan Desa. Dinas PMD mengatakan bahwa selama ini tidak ada kesulitan berkordinasi dengan Dinas terkait lainnya seperti Dinas PPPA misalnya terkait program-program perlindungan anak, hal ini karena adanya forum koordinasi UPT di tingkat kabupaten Bandung. Menurutnya masing-masing Dinas melakukan koordinasi dan pelaporan terkait dengan program-program yang sedang telah dilakukan, sehingga pada beberapa kali kesempatan dinas PMD juga terlibat pada kegiatan dinas PPPA.



PELAKSANAAN KEGIATAN

Monitoring dan Evaluasi

Gambaran Pelaksanaan

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



4. Kepala UPTD PPPA

Dalam Wawancara dengan Kepala UPPTD PPA Kabupaten Bandung Bapak Aang Kuswara menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung berkomitmen untuk melakukan perlindungan dan pendampingan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, sehingga Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan anggaran khusus untuk UPTD PPPA dan juga adanya kantor khusus untuk pengaduan, konsultasi dan pendampingan korban.

Terkait dengan luasnya wilayah Kabupaten Bandung, maka Dinas PPPA dan UPTD PPPA berinisiatif untuk menjangkau pengaduan dan pendampingan kasus maka membentuk satgas pengaduan kasus ditingkat kecamatan, saat ini fungsi dan perannya belum maksimal, namun pada beberapa kecamatan telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana untuk pengaduan kasus, sehingga kemudian satgas melaporkan kepada UPTD PPPA ditingkat Kabupaten.



Sedangkan Diskusi Terfokus/Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 di Hotel Grand Sunshine. Peserta FGD Monev adalah stakeholder dari 7 Desa di Kabupaten Bandung Jawa Barat, yaitu Desa Margahayu Tengah, Rahayu, Sangiang, Cilampeni, Tanjung Sari, Pemekaran dan Gajah Mekar. Beberapa peserta yang hadir dalam FGD tersebut diantaranya perwakilan dari Pemerintah Desa, BPD, PATBM, Fórum Anak, PKK dan Tokoh Agama.

PELAKSANAAN KEGIATAN

— Monitoring dan Evaluasi

Temuan Penting

Dalam pelaksanaan kegiatan Monev terdapat beberapa catatan penting yang merupakan temuan dari Monev di 7 Desa Ramah Anak Terbebas dari pornografi di Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Ditemukan sudah adanya sistem penanganan kasus kekerasan terhadap anak berbasis komunitas di tingkat kecamatan, sebanyak 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, namun yang telah pro-aktif melakukan penanganan kasus terdapat 2 kecamatan yaitu Kecamatan Pangalengan Desa Marga Mekar dan Kecamatan Bale Endah Desa Rancak Manyar;
2. Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk UPTD PPPA berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 dan telah menganggarkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan menyediakan sarana dan prasarana penanganan kasus yaitu kantor pengaduan dan rumah aman;
3. Dinas PPPA telah memiliki program sosialisasi rutin bulanan untuk pencegahan pornografi melalui pendidikan pengasuhan di era digital;
4. Dinas PPPA Kabupaten Bandung telah berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan program Pembentukan Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi namun saat ini proses pengembangannya terkendala dengan anggaran;
5. Perlu adanya revisi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kota Layak Anak dimana didalamnya diatur pasal tentang pembentukan Desa Ramah Anak terbebas dari pornografi di Kabupaten Bandung dan strategy pencegahannya;
6. Pentingnya peran serta Pemerintah Kabupaten terutama Dinas PPPA dalam memberikan dukungan dan arahan perwujudan pelaksanaan kegiatan pencegahan pornografi anak di tingkat Desa khususnya dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat Desa yaitu Peraturan Desa tentang perlindungan anak dari kekerasan termasuk pornografi;
7. Pentingnya koordinasi lintas Organisasi perangkat Daerah (OPD) atau antar Dinas di Kabupaten dalam mendukung perwujudan Desa ramah Anak Terbebas dari Pornografi, misalnya Dinas PMD memiliki peran penting dalam memandu desa menyusun pengalokasian dana desa khususnya bagi upaya perlindungan anak;
8. Di Kabupaten Bandung telah ada kelompok kerja operasional yang terdiri dari lintas OPD atau antar Dinas untuk mengkomunikasikan program-program di masing-masing dinas, sehingga program Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi telah diketahui oleh Dinas PMD, namun dinas PMD belum secara khusus memandu desa dalam penganggaran dana desa untuk upaya perlindungan anak, dimana Dinas PMD saat ini memandu dan mendorong agar menggunakan dana Desa digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik namun juga seharusnya digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Menteri dan juga Pemerintah Kabupaten;
9. Pemerintah Desa belum Menyusun Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak, namun di masing-masing Desa telah membentuk Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
10. Organisasi PKK di kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dimana unsur PKK terlibat dalam program sosialisasi dan pendidikan tentang pengasuhan di era digital di masing-masing kecamatan, dan PKK merupakan anggota Satgas Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di tingkat kecamatan, sehingga kedepan PKK harus menjadi unsur prioritas yang dilibatkan dalam proses pencegahan pornografi;
11. Pentingnya meningkatkan partisipasi anak dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
12. Masing-masing Desa membutuhkan adanya program lanjutan untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan upaya pencegahan pornografi berbasis komunitas melalui pembentukan desa ramah anak terbebas dari pornografi.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi

Latar Belakang

Pada pelaksanaan pembentukan Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi di tahun 2023 ini, KemenPPPA dengan ECPAT Indonesia berupaya untuk menempatkan program ini di daerah yang benar-benar membutuhkan intervensi. Dimana berdasarkan rapat antara KemenPPPA dengan ECPAT Indonesia, KemenPPPA menyarankan agar pemilihan daerah intervensi didasarkan pada kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual.

Berdasarkan hal itu, ECPAT Indonesia melakukan asesmen melalui pemberitaan media, dimana ditemukan bahwa daerah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu adalah daerah yang rentan terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, terdapat pertimbangan lain yang menguatkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong layak untuk mendapatkan program intervensi, yaitu infrastruktur penanganan kasus kekerasan seksual baik dari sisi fasilitas, sumber daya manusia pada lembaga pemberi layanan dan juga pemahaman masyarakatnya tentang kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak masih minim. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipilihlah 3 Desa yaitu Desa Belumai II, Desa Tebat Pulau dan Desa Mojorejo dimana ketiganya merupakan Desa yang rentan terjadi kekerasan dan eksploitasi seksual anak.

Dalam menumbuhkan rasa kepemilikan program pelatihan pembentukan desa ramah anak terbebas dari pornografi, KemenPPPA dan ECPAT Indonesia berupaya untuk melibatkan lintas UPT atau antar dinas terkait, sehingga dalam pelatihan ini tidak hanya melibatkan Dinas PPPA namun juga Dinas Kominfo, Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber.



PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi

Gambaran Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14-15 September 2023 di Hotel Golden Rich 88 Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan ini dibuka oleh Bapak Kepala Dinas PPPA Provinsi Bengkulu, dengan dilengkapi pidato sambutan dari Dinas PPPA Kabupaten Rejang Lebong dan Pak Didik mewakili dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

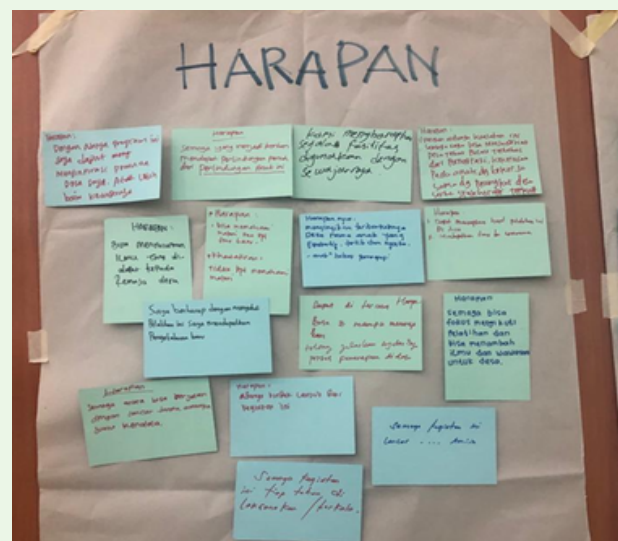


Dalam Pelatihan tersebut dihadiri oleh 50 peserta yang berasal 3 Desa yaitu Desa Belunai II, Desa Tebat Pulau dan Desa Mojorejo. Adapun peserta tersebut berasal dari perwakilan anak-anak, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa, BPD dan Karang Taruna serta Forum Anak Kabupaten Rejang Lebong.



Ketiga Desa belum memiliki dan membentuk Forum anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Sementara situasi kerentanan masing-masing desa untuk terjadi kekerasan seksual sangat tinggi, judi online, Game online dan anak-anak yang terpapar narkoba. Sehingga membutuhkan kecepatan atau urgensi desa dalam membentuk Forum Anak dan PATBM.

Sementara itu, Forum Anak yang diwakili oleh 5 orang ditingkat kabupaten Rejang Lebong bersedia melakukan pendampingan dan membantu peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat Desa.

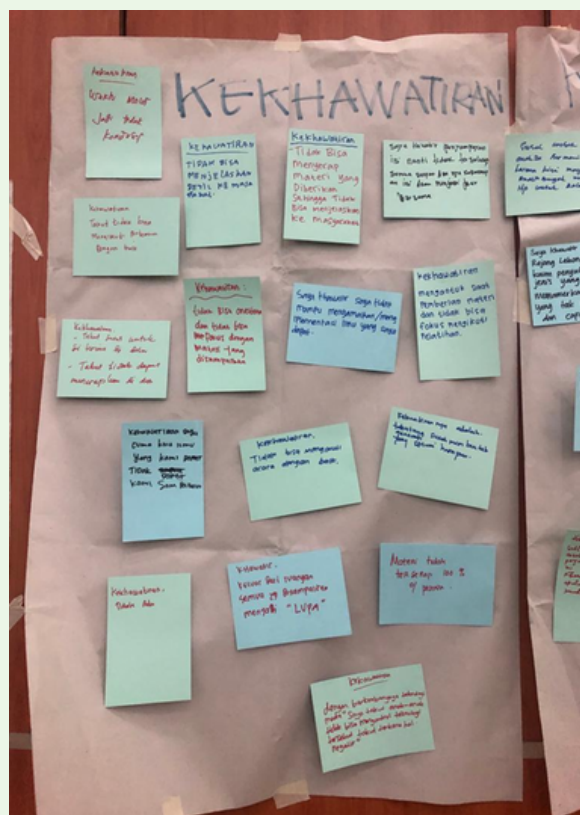


PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi

Gambaran Pelaksanaan

Dalam pelatihan tersebut, dipandu oleh 4 narasumber yang memiliki kompetensi dalam memberikan masukan dan pengayaan pengetahuan bagi masyarakat di 3 Desa, diantaranya bapak Andy Ardian dan Dr Ahmad Sofian dari ECPAT Indonesia, Kepala Dinas KOMINFO dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.



Diakhir pelatihan, peserta dari ketiga Desa sepakat akan Menyusun Peraturan Desa yang mengatur tentang upaya perlindungan anak di tingkat Desa dan membuat program-program sosialisasi untuk mencegah terjadinya kasus eksploitasi seksual anak khususnya pornografi anak. Selain itu ketiga Desa sepakat akan segera membentuk Forum anak dan juga PATBM ditingkat Desa.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi

Hasil Capaian Pelatihan

Berikut ini adalah beberapa capaian dari pelatihan pembentukan desa ramah anak terbebas dari pornografi di 3 Desa di Kabupaten Rejang Lebong:

Analisa Potensi Desa

Pada pelatihan ini peserta diajak untuk mengenali dan memetakan potensi, peluang desa, masalah yang terdiri dari kelemahan dan hambatan yang memicu terjadinya kerentanan anak di desa menjadi korban pornografi. Pemetaan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT, Adapun hasil dari analisa yang dilakukan oleh masing-masing desa adalah sebagai berikut:

1. Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis SWOT)

Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil Analisa SWOT yang dilakukan oleh Desa Belumai II:

- Terdapat 2 organisasi remaja di desa yaitu Karang Taruna dan Risma
- Terdapat organisasi perempuan PKK di desa, dimana pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran untuk PKK dengan menggunakan dana desa, namun kelemahannya adalah peran dan fungsi PKK baru dipahami oleh Pemerintah Desa, namun hal ini belum dipahami oleh masyarakat
- Terdapat kelompok kesenian anak-anak, namun Desa belum memiliki wadah untuk kelompok kesenian tersebut, kendala lainnya adalah sulit dan mahalnya harga alat-alat kesenian tersebut, karena harus didatangkan dari luar kota.
- Koneksi internet sangat bagus, sementara itu anak-anak muda banyak yang bermain internet seperti facebook, Tiktok, Instagram, Youtube dll, peluang ini gayung bersambut dengan kekuatan desa dimana sebagai desa penghasil kopi, hal ini tentunya membuka peluang bagi Desa untuk memasarkan hasil kopi di desanya melalui internet, sehingga jangkauan pembelinya lebih luas diseluruh Indonesia bahkan sampai mancanegara.
- Belum mengorganisir anak-anak untuk berorganisasi dalam wadah forum anak atau Desa saat ini belum membentuk Forum Anak sehingga partisipasi anak-anak belum diakomodir dalam pembangunan Desa.
- Belum ada system mitigasi atau system pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual, misalnya belum dibentuknya PATBM, belum memahami mekanisme pelaporan dll.
- Maraknya anak-anak muda yang terpapar narkoba.



PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi

2. Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu (Analisis SWOT)



Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil Analisa SWOT yang dilakukan oleh Desa tebat Pulau:

- Terdapat banyak masalah social pada anak-anak muda di Desa, misalnya terpapar narkoba, judi online, tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan anak-anak menjadi pemalas karena kecanduan game slot dan berupaya mendapatkan uang melalui judi online.
- Banyaknya aliran sesat, sedangkan remaja kurang aktif berorganisasi sementara tingkat kelulusan anak-anak remaja ini sebanyak 55% lulus SMA, sehingga dengan literasi yang rendah, sosialisasi remaja yang kurang terutama dalam hal kegiatan-kegiatan positif, menyebabkan anak-anak remaja sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- Meskipun jaringan internet kurang namun banyak anak-anak yang bermain internet seperti Facebook, youtube dan Tiktok
- Saat ini masyarakat Desa hidup rukun, namun terdapat potensi konflik social yaitu adanya gesekan karena perbedaan suku/ras. Hal itu diperparah dengan banyaknya pengaruh lain yang masuk ke Desa.
- Banyaknya pengaruh luar yang masuk ke desa ini dikarenakan desa ini dilintasi oleh jalan lintas Sumatra yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lubuk Linggau, propinsi Sumatra Selatan, sehingga banyak orang luar yang mampir dan juga tinggal di desa ini.
- Desa ini juga banyak terjadi kasus begal, karena jalan lintas yang menghubungkan propinsi Bengkulu dan Sumatra Selatan, sehingga desa mereka terdampak dengan stigma desa yang banyak begal.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi

3. Desa Mojorejo (Analisis SWOT)



Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil Analisa SWOT yang dilakukan oleh Desa Mojorejo:

- Minimnya literasi digital atau pemahaman dalam berinternet termasuk terkait dengan kerentanan anak menjadi korban pornografi.
 - Adanya narkoba dan judi online yang menjangkit masyarakat desa termasuk anak-anak dan remaja
 - Banyaknya anak-anak dan remaja yang merokok
- Namun di desa telah ada kelompok-kelompok yang berkegiatan positif misalnya kelompok pengajian, kelompok tani (Wanita tani), Karang Taruna
 - Masyarakat desa menjunjung tinggi adat istiadat
 - Sumber daya alam yang melimpah khususnya dikenal sebagai Desa penghasil sayur mayur dan kopi
 - Peran desa dan kelembagaan yang ada di desa cukup berperan aktif dalam pembangunan desa
 - Sumber pendanaan di desa kurang sehingga mempengaruhi pengembangan desa

Gambaran Peserta

Pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Terbebas Dari Pornografi diikuti oleh sebanyak 52 orang, yang terdiri dari 20 perempuan dan 32 orang laki-laki. Adapun peserta perwakilan yang hadir diantaranya berasal dari:

- | | |
|---|--------------------|
| • Dinas PPPA Provinsi Bengkulu | • PKK |
| • Dinas PPPA Kabupaten Rejang Lebong | • Karang taruna |
| • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong | • Remaja |
| • Forum Anak Kabupaten Rejang Lebong | • Anak-anak |
| • Pemerintah Desa, termasuk kepala Desa dari 3 Desa | • Tokoh Masyarakat |
| • BPD dari 3 Desa | • Babinsa |
| • PKK | • Babinkamtibmas |
| | • Kepala Adat |

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi

Rencana Tindak Lanjut

Pada sesi akhir pelatihan ini, peserta dari 3 Desa Menyusun rencana tindak lanjut, sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi anak dari pornografi. Adapun secara garis besar, rencana tindak lanjut dari 3 Desa adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing desa berencana untuk Menyusun dan mengesahkan kebijakan perlindungan anak di Desa melalui peraturan Desa/ Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perlindungan Anak dari pornografi
2. Masing-masing desa sepakat membentuk dan akan menguatkan Forum Anak dan juga PATBM di masing-masing desa
3. Masing-masing Desa akan melakukan program Pendidikan dan kampanye perlindungan anak dari bahaya pornografi melalui sosialisasi kepada anak-anak dan juga orang tua, serta unsur-unsur masyarakat di desa
4. Desa Tebat Pulau akan melakukan peningkatan fasilitas ramah anak melalui pembangunan taman bermain anak
5. Desa Mojorejo dan Belumai II akan melakukan penganggaran dana desa untuk upaya perlindungan anak dari bahaya pornografi melalui musrembang Desa

HAMBATAN, TANTANGAN — DAN PELUANG

Dalam pelaksanaan pelatihan Pembentukan Desa Ramah Terbebas dari Pornografi terdapat beberapa hambatan dan tantangan, yaitu:

- 1** Hambatan teknis, yaitu ruang pelatihan yang terlalu luas sehingga menyebabkan suara menggaung dan menjadi kurang jelas
- 2** Dari 3 Desa, terdapat 2 Desa yaitu desa Tebat Pulau dan Belumai II yang belum pernah mendapatkan intervensi atau mengikuti pelatihan dari pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah provinsi dan pusat sehingga dihari pertama harus beradaptasi pada saat berusaha memahami materi-materi pelatihan yang diberikan, dan terkesan pasif.
- 3** Hari Pertama terdapat sikap skeptis peserta dari satu Desa, terhadap pelatihan pembentukan desa ramah anak terbebas dari pornografi, dengan mengusulkan agar pelatihan ini cukup dilaksanakan singkat selama satu hari saja.
- 4** Di hari kedua, peserta dari ketiga Desa bersemangat mengimplementasikan hasil pelatihan di Desanya dengan berkomitmen akan menyusun Peraturan Desa dan membentuk Forum Anak dan PATBM.
- 5** Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong selama 2 hari penuh mengikuti pelatihan, guna mendampingi dan menyerap aspirasi peserta dari 3 Desa, terkait dengan persoalan, hambatan, peluang, kelemahan dan kekuatan desa dalam melakukan upaya pencegahan pornografi.
- 6** Pemerintah Provinsi Bengkulu, cukup tertarik dan aktif dalam mengikuti pelatihan ini, selama 2 hari perwakilan dari propinsi Bengkulu mengikuti penuh pelatihan ini dengan antusias.

REKOMENDASI

- 1** Pentingnya penguatan kapasitas masyarakat di 3 Desa dalam program lanjutan untuk desa ramah anak terbebas dari pornografi;
- 2** Pentingnya koordinasi lintas dinas terkait, untuk mengimplementasikan program ini, sehingga terdapat dukungan kepada Dinas PPPA dari dinas-dinas lain seperti Dinas Kominfo, Dinas PMD dan Dinas Pendidikan
- 3** Pentingnya dukungan dari pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk melanjutkan program ini dengan bekerjasama dengan Dinas PPA Kabupaten Rejang Lebong, agar desa-desa lain bisa mendapatkan penguatan terkait desa ramah anak terbebas dari pornografi.
- 4** Membentuk UPTD PPA di Kabupaten Rejang Lebong untuk bisa memberikan pelayanan maksimal bagi korban-korban eksploitasi seksual anak, khususnya korban pornografi anak.
- 5** Membuat kebijakan pemerintah daerah yang terkait Perlindungan anak dari situasi pornografi agar para desa memiliki dasar dalam membuat Perdes untuk pencegahan pornografi di desa.

LAMPIRAN

Tabel 1: Hasil Analisa SWOT Desa Belumai II

Desa Belumai II, Kecamatan Padang Uluak Tanding

INTERNAL		EKSTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan	Hambatan	Peluang
1. Adanya Organisasi Pemuda Pasul (Karang Taruna dan Risma)	Tidak semua remaja mengikuti kegiatan di Karang Taruna dan Risma	Kurangnya Sosialisasi manfaat dari organisasi remaja ini.	Mengadakan Sosialisasi manfaat masuk dalam organisasi remaja.
2. Pemdes tahu Fungsi & peran PKK Sudah ada Anggotanya Desa Kpd PKK	Masy belum paham fungsi PKK	Belum ada Pembina dari Kecamatan untuk Sosialisasi Fungsi PKK	Di Kecamatan ada Pembina PKK
Adanya Kelompok Kesenian Anak-Anak Kecil Punya Bakat	Belum ada wadah Kesenian	Alat = Kesenian sulit didapatkan	Ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	HAMBATAN	PELUANG
Adanya organisasi remaja masuk (Karang Taruna dan Risma)	Tidak semua remaja mengikuti kegiatan di Karang Taruna dan Risma	Kurangnya sosialisasi manfaat dari organisasi remaja ini	Mengadakan sosialisasi manfaat masuk dalam organisasi remaja
Pemerintah Desa tahu fungsi dan peran PKK	Masyarakat belum paham fungsi dan peran PKK	Belum ada Pembina dari kecamatan untuk sosialisasi fungsi PKK	Di kecamatan ada Pembina PKK

LAMPIRAN

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	HAMBATAN	PELUANG
Sudah ada anggaran desa kepada PKK			
Adanya kelompok kesenian anak-anak kecil yang memiliki bakat	Belum ada wadah kesenian	Alat-alat kesenian sulit didapatkan	Ada dinas pendidikan dan kebudayaan
Penghasil kopi, karet, sawit	Anak orang muda banyak yang bermain internet	Mengakses internet untuk game online, Tiktok, FB dan Youtube	Internet mudah diakses di seluruh wilayah desa kopi adalah produk primadona Indonesia
Anak orang muda banyak yang bermain internet			
Sudah ada Sekolah PAUD	Kurangnya fasilitas Sekolah PAUD Belum adanya Pendidikan seksualitas pada anak usia dini	Belum adanya kurikulum pendidikan seksualitas pada anak usia dini	Di kecamatan ada pemilik PAUD Ada dinas pendidikan

LAMPIRAN

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	HAMBATAN	PELUANG
Adanya posyandu remaja	Tidak semua remaja mengikuti kegiatan masyarakat remaja Kurangnya motivasi diri anak untuk mengikuti kegiatan posyandu remaja	Tidak berjalannya kembali kegiatan posyandu remaja	Di puskesmas ada program posyandu remaja

LAMPIRAN

Tabel 2: Hasil Analisa SWOT Desa Tebat Pulau

The image shows a handwritten SWOT analysis on a piece of paper. The paper is divided into four quadrants by a vertical line and a horizontal line. The top-left quadrant is labeled 'INTERNAL' and 'KEKUATAN' (Strengths). The top-right quadrant is labeled 'EKSTERNAL' and 'PELUANG' (Opportunities). The bottom-left quadrant is labeled 'INTERNAL' and 'KELEMAHAN' (Weaknesses). The bottom-right quadrant is labeled 'EKSTERNAL' and 'HAMBATAN' (Threats). The handwritten text in each quadrant is as follows:

- INTERNAL - KEMUKATAN:**
 1. Ada kelompok pengajian
 2. Ada kelompok 2 Tari (wanita Tari)
 3. Ada Perhimpunan Pemuda (Kang Taruna)
 4. Mengunjungi tingsi Adat Istiadat
 5. Pemerintah desa dan Kelengkapan Berperan aktif
 6. Sumber Daya Alam yg Cukup Menantang
- INTERNAL - KELEMAHAN:**
 1. Sumber Daya
 2. Minimnya Penghasilan
 3. Akses Internet
 4. Kesadaran Masyarakat Masih Kurang Ada banyak yg peserta
 5. Sumber daya manusia masih rendah
 6. Banyaknya orang yg di bawah umur yg merokok
- EXTERNAL - PELUANG:**
 1. Wisata
 2. Desa yang Adat Istiadat
 3. Desa yang Adat Istiadat
 4. Desa yang Adat Istiadat
 5. Desa yang Adat Istiadat
 6. Desa yang Adat Istiadat
- EXTERNAL - HAMBATAN:**
 1. Sumber Daya
 2. Minimnya Penghasilan
 3. Akses Internet
 4. Kesadaran Masyarakat Masih Kurang Ada banyak yg peserta
 5. Sumber daya manusia masih rendah
 6. Banyaknya orang yg di bawah umur yg merokok

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	HAMBATAN	PELUANG
Tingkat kelulusan SMA 55%	Tingkat pengangguran tinggi	Judi online	Anak-anak menjadi paham permainan game slot dan menghasilkan uang
Remaja kurang aktif berorganisasi	Kurangnya dukungan dari orang tua	Banyak aliran sesat	Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk

LAMPIRAN

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	HAMBATAN	PELUANG
Masyarakat hidup rukun	Masih menimbulkan kelompok-kelompok tertentu (suku/ras)	Banyak pengaruh lain yang masuk ke desa	Dapat mengetahui berbagai macam suku dan kebudayaan
Jaringan internet	Kurangnya mendapatkan informasi	Adanya tower internet	Bermedsos lancar (Instagram, Tiktok, FB)

LAMPIRAN

Tabel 3: Hasil Analisa SWOT Desa Mojorejo

INTERNAL		EKSTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan	Hambatan	Peluang
- Tingkat kelulusan SMA 55% - Remaja kurang aktif berorganisasi - Masyarakat hidup rukun - Jaringan internet	- Tingkat pengangguran tinggi - Kurangnya dukungan dari orang tua - Masih menrimbutkan kelompok 3 tertentu (suku, Tuts) - Kurang mendapatkan informasi	- Judi Online - Banyak mitos Sese - Banyak pengaruh dari yang masuk ke desa - Adanya Tower Internet	- Adanya kemajuan dalam pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan - Bisa mendapatkan manna yang baik dan mana yang buruk - Dapat mengetahui berbagai macam suku dan kebudayaan - Bermesoc lancar (Instagram, tiktok, Fb)

Desa Tabet Pulu
Kec. Bermani Luu

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	HAMBATAN	PELUANG
Ada kelompok pengajian	Minimnya pengetahuan akses internet	Narkoba dan Game Online	Diadakan BIMTEK dari Kementerian mengenai pornografi
Ada kelompok tani (Wanita Tani)	Kesadaran masyarakat masih kurang akan bahayanya pornografi		Desa yang terkenal dengan sayur dan kopi

LAMPIRAN

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	HAMBATAN	PELUANG
Ada perkumpulan pemuda (Karang Taruna)	Sumber daya manusia masih rendah		
Menjunjung tinggi adat istiadat	Banyaknya anak-anak yang di bawah umur merokok		
Pemerintah desa dan kelembagaan berperan aktif			
Sumber daya alam yang cukup memadai			

LAMPIRAN

Tabel 4: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Desa Tebat Pulau

N o.	Agenda	Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat rutin Karang Taruna dan Risma (Dalam bulan ini selesai dilaksanakan)	v				v				v			
2	Pembentukan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (Diikutsertakan dalam Musrembang Desa dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa)		v										
3	Pembuatan taman bermain ramah anak						v		v				
4	Pembentukan dan pelatihan/sosialisasi tentang pornografi kepada Forum Anak (SD, SMP, SMA)								v				

LAMPIRAN

Tabel 5: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Desa Mojorejo

N o.	Agenda	Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat hasil pertemuan/bimbingan pembentukan desa ramah anak				v								
2	Rapat pembentukan tim petugas sosialisasi				v								
3	Pembentukan forum anak tingkat desa dan membahas kelemahan dan hambatan				v								
4	Membahas anggaran dan jadwal pelaksanaan pada MUSREMBANG tingkat desa				v								
5	Pelaksanaan sosialisasi desa ramah anak agar terbebas dari pornografi						v						
6	Evaluasi								v				

LAMPIRAN

Tabel 6: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Desa Belumai II

N o.	Agenda	Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat rutin Desa Belumai II Pembentukan Forum Anak (Forum Anak Rejang Lebong tingkat Belumai II – FAREL BMD)	v				v				v			
2	- Pemeriksaan golongan darah untuk remaja - Pendataan remaja berkoordinasi dengan Puskesmas, BABINSA, dan BABINKAMTIBMAS							v					
3	Merumuskan SK Kepala Desa						v						
4	Musrembang Desa							v					
5	Evaluasi												v



SECRETARIAT OF ECPAT INDONESIA



Jl. Angsana 1 No.16, RT.10/RW.5, Pejaten Timur,
Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12510



(021) 25034840 / 0811-9771-775